

BAB I

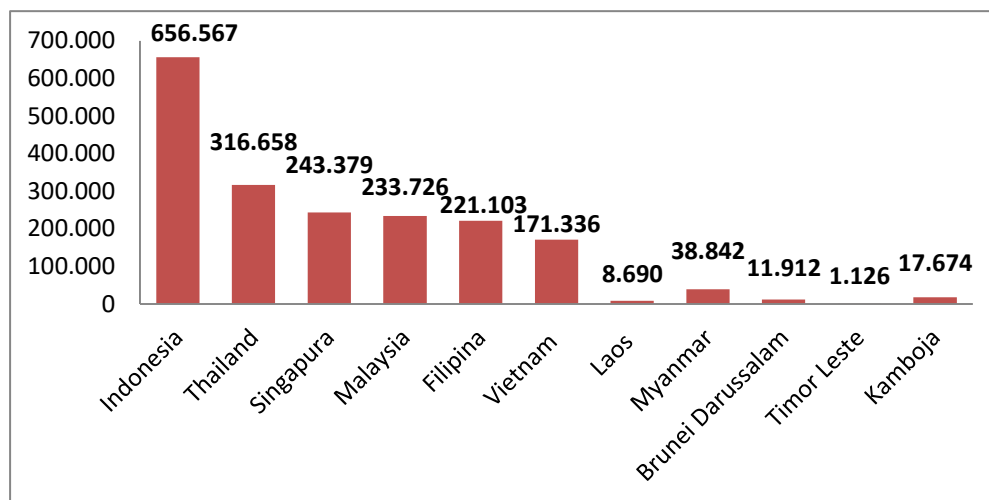
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dinamika pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh globalisasi, integrasi perdagangan, dan kemajuan teknologi digital yang mengubah struktur pasar dan pola produksi (Neffati, 2025). Globalisasi membuka peluang percepatan pertumbuhan melalui aliran modal, tenaga kerja, dan teknologi lintas negara, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti krisis keuangan dan konflik geopolitik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan fenomena global yang saling terhubung (An *et al.*, 2022).

Kawasan ASEAN melalui pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan PDB riil dan PDB per kapita yang dipengaruhi oleh integrasi ekonomi regional, seperti ASEAN *Economic Community* (AEC), yang memperluas akses pasar dan menurunkan hambatan perdagangan (Shimizu, 2021). Faktor utama pendorongnya meliputi arus investasi asing langsung (FDI), perdagangan eksternal, dan transformasi struktural menuju sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah, namun ketergantungan berlebihan pada rantai pasok global serta lemahnya institusi dapat meningkatkan risiko guncangan eksternal. Selain itu, isu non-ekonomi seperti ketimpangan wilayah dan kerentanan iklim juga berpotensi menghambat pertumbuhan berkelanjutan jika tidak diimbangi dengan kebijakan inklusif dan strategi mitigasi risiko (Hornstein, 2024).

Berikut perbandingan rata-rata PDB negara-negara ASEAN menggunakan (US\$ saat ini), yaitu sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Rata-rata Produk Domestik Bruto (US\$ Saat Ini)
di Negara ASEAN (Miliar USD)**

Sumber: *World Development Index, 2026*

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata PDB pada negara ASEAN dari tahun 1995-2024 (yang diolah dengan menjumlahkan seluruh data dan dibagi banyaknya data yaitu 30 tahun) di mana terdapat disparitas skala ekonomi yang cukup signifikan antarnegara. Indonesia mencatat posisi tertinggi dengan rata-rata PDB sebesar USD 656.567.634.635, disusul oleh Thailand sebesar USD 316.658.276.611, Singapura sebesar USD 243.379.340.752, Malaysia sebesar USD 233.726.254.936 dan Filipina sebesar USD 221.103.331.473. Kelima negara ini secara konsisten menjadi inti kekuatan ekonomi pada kawasan ASEAN, baik dari sisi ukuran pasar, integrasi perdagangan internasional, maupun terhadap total output regional.

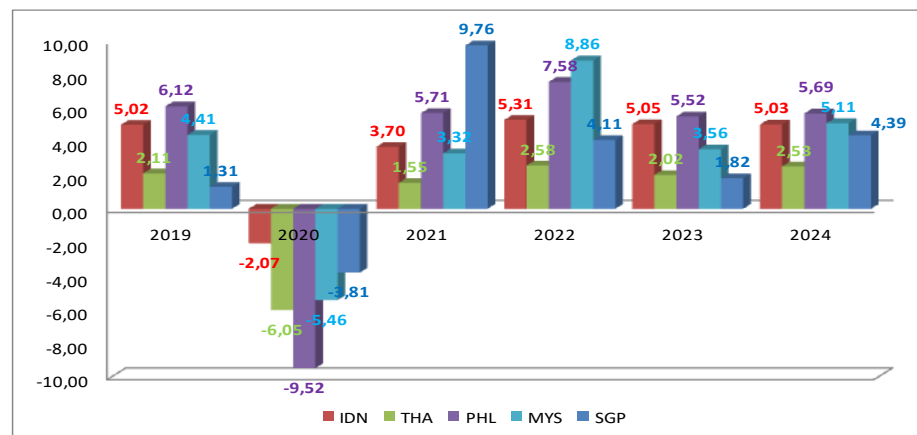
Berikutnya pada negara lain seperti Vietnam mencatat rata-rata PDB sebesar USD 171.336.852.661, Myanmar sebesar USD 38.842.959.619, Kamboja sebesar USD 17.674.903.694, Brunei Darussalam sebesar USD 11.912.124.170,

Laos sebesar USD 8.690.538.158 dan Timor Leste sebesar USD 1.126.471.646. Negara-negara ini mencerminkan keterbatasan pada struktur industri, ukuran pasar domestik, dan kapasitas akumulasi modal.

Pertumbuhan ekonomi di ASEAN masih menjadi isu menarik untuk dibahas lebih lanjut, terutama pada 5 negara ASEAN yang memiliki PDB tertinggi yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina. Berdasarkan data World Bank tahun 2024 pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 menunjukkan rata-rata tertinggi dibanding dengan negara anggota BRICS, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 pada tahun 2024 sebesar 4,55%. dan BRICS sebesar 3,95%. Begitu pula pada negara-negara Amerika Latin dan Kepulauan Karibia hanya mencatat pertumbuhan sebesar 2,25% dan Uni Eropa sebesar 1,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada ASEAN-5 turut dalam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global dengan cakupan kawasan yang sangat strategis dan vital dalam perdagangan internasional serta menjadi pusat investasi pada negara-negara seperti Singapura, Indonesia dan Malaysia yang juga memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan negara-negara tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada 5 negara ASEAN dengan PDB tertinggi, dengan ketersediaan data yang lengkap dan penganalisisan karakteristik ekonomi yang beragam pada negara-negara ASEAN-5 serta letak strategisnya yang begitu penting bagi keterbukaan perdagangan menjadikan negara-negara ini menjadi penting untuk diteliti. Selain itu, untuk negara lain seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam dan Timor Leste tidak diikut sertakan karena terbatasnya data dalam analisis ekonomi pada penelitian ini.

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran krusial bagi suatu negara karena menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, serta memperbesar kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Haider *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan disertai peningkatan pertumbuhan setiap tahunnya menjadi tujuan utama bagi suatu negara untuk memajukan ekonomi wilayah kekuasaannya. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 tahun 2022-2024 yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-5 (Persen)

Sumber: *World Development Index, 2026*

Berdasarkan Gambar 1.2, pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama periode 2019-2024. Tahun 2020 menjadi titik terendah ketika seluruh negara mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang memicu pembatasan mobilitas, penurunan ekspor, menekan konsumsi, menurunnya investasi asing, dan terhentinya sektor pariwisata. Filipina mencatat kontraksi terdalam sebesar -9,52%, diikuti Thailand -6,05%, Malaysia -5,46%, Singapura -3,81%, dan Indonesia -2,07%.

Pertumbuhan yang relatif stabil di Indonesia pada tahun 2022 yakni 5,31% menjadi 5,05% pada tahun 2023 dan menurun sedikit pada tahun 2024 sebesar 5,03% yang menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang cukup kuat. Stabilitas ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sehingga Indonesia tidak terlalu terdampak fluktuasi global (Nugroho & Ardianto, 2025).

Pertumbuhan ekonomi Thailand pada tahun 2022 relatif rendah dan cenderung stagnan yakni 2,58% dan menurun pada tahun 2023 sebesar 2,02% kemudian pada tahun 2024 sedikit naik sebesar 2,53%. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural, yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata dan ekspor yang sangat sensitif terhadap kondisi global. Perlambatan pada tahun 2023 menunjukkan lemahnya permintaan eksternal dan pemulihan pariwisata yang belum optimal (Sari *et al.*, 2023).

Filipina mengalami pertumbuhan tinggi pada 2022 yakni 7,58%, namun menurun menjadi 5,52% pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 5,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Filipina mengalami peningkatan pada fase awal pemulihan, yang kemudian mengalami normalisasi. Konsumsi domestik dan remitansi tenaga kerja luar negeri menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan tetap tinggi meskipun terjadi perlambatan global (Sylviana, 2024).

Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 terjadi fluktuasi yang paling tajam yakni 8,86% pada tahun 2022 turun drastis menjadi 3,56% pada tahun 2023, kemudian pulih ke 5,11% pada tahun 2024. Penurunan tajam ini mencerminkan tingginya sensitivitas terhadap siklus global, khususnya sektor

ekspor komoditas dan manufaktur. Namun, pemulihan pada 2024 menunjukkan efektivitas stimulus fiskal dan peningkatan permintaan domestik (Pramana & Syafri, 2023).

Singapura menunjukkan pola fluktuasi yang cukup ekstrem, dari 4,11% pada tahun 2022 turun tajam ke 1,82% pada tahun 2023, lalu meningkat lagi ke 4,39% pada tahun 2024. Sebagai negara dengan ekonomi sangat terbuka, Singapura sangat dipengaruhi oleh perdagangan global dan arus investasi internasional. Perlambatan tajam pada 2023 mencerminkan kontraksi sektor eksternal, terutama elektronik dan jasa perdagangan, sementara pemulihan 2024 menunjukkan perbaikan siklus global (Sumule *et al.*, 2024).

Pemerintah berperan sebagai pelaku sekaligus pengatur dalam sistem perekonomian suatu negara (Hornstein, 2024). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan menetapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kinerja ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penyaluran alokasi investasi pada sektor-sektor strategis yang dinilai penting dan membutuhkan perhatian khusus.

Pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 menunjukkan kinerja yang relatif stabil namun tetap fluktuatif, peningkatan ekonomi tersebut sering kali diikuti oleh meningkatnya arus *foreign direct investment* sebagai salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi. FDI berperan penting dalam mendorong ekspansi sektor industri, pembangunan infrastruktur, serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi di negara-negara tersebut. Masuknya investasi asing ini mempercepat proses industrialisasi dan memperluas lapangan kerja.

Nguyen & Khanh (2025) menemukan FDI, akumulasi modal fisik, tenaga kerja, dan keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kawasan ASEAN-5. *Foreign Direct Investment* merupakan investasi lintas negara di mana investor asing menanamkan modal untuk memperoleh kepemilikan jangka panjang dan pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Bentuknya dapat berupa *greenfield investment*, merger dan akuisisi lintas negara, atau reinvestasi laba dari perusahaan asing yang telah beroperasi (Islam & Beloucif, 2024). Berbeda dari investasi portofolio, FDI melibatkan partisipasi aktif investor dalam manajemen dan pengawasan operasional perusahaan.

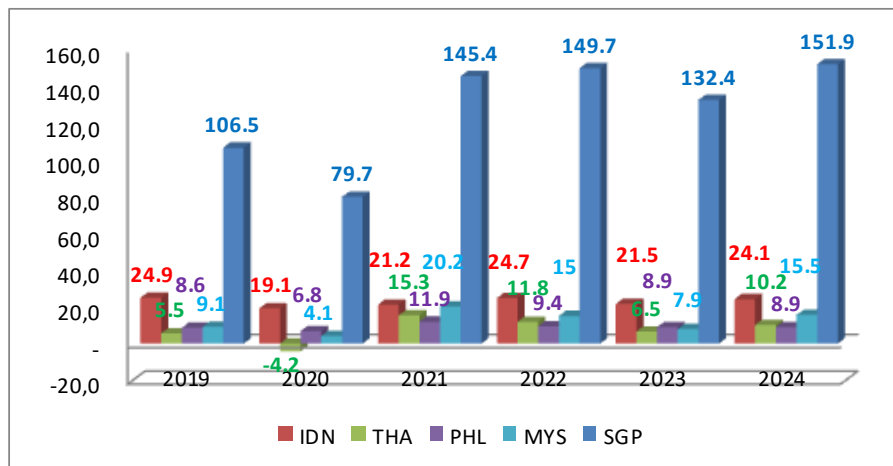
Berdasarkan laporan ASEAN Investment Report pertumbuhan FDI kawasan ASEAN sebesar 10% dengan total nilai mencapai USD 225 miliar. Hal ini mengukuhkan ASEAN sebagai destinasi utama investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Adapun sektor manufaktur menjadi kontributor utama dengan penyerapan investasi sekitar USD 44 miliar di kawasan ASEAN. Sektor ini didorong oleh industri intensif rantai pasok dan transformasi ekonomi digital. Selain itu, sektor keuangan serta kegiatan ilmiah dan teknis juga menjadi motor penggerak pertumbuhan nilai tambah di kawasan ini (UNCTAD, 2025).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat pada triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa sektor industri yang mengalokasikan investasi asing ke sektor-sektor prioritas diantaranya industri logam dengan realisasi penerimaan investasi masuk sebesar USD 3.643,47 juta disusul pada sektor pertambangan sebesar USD 1.192,03 juta (*sumber:goodstats*).

Salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia adalah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13,73% pada tahun 2024. Adapun pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertambangan dan pengolahan industri nikel termasuk didalamnya pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang menarik modal asing dan menciptakan lapangan kerja melalui kebijakan hilirisasi ekonomi.

Studi oleh Fazaalloh (2024) menyatakan bahwa sektor manufaktur dan pertambangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa investasi asing di sektor industri manufaktur memiliki dampak yang sangat besar dibanding dengan sektor lain dalam meningkatkan output ekonomi daerah.

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer dan Lucas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi modal, tetapi juga oleh kemajuan teknologi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Pada tahap awal, masuknya FDI ke suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penambahan modal dan ekspansi aktivitas produksi, terutama pada sektor industri dan manufaktur. Investasi asing ini mendorong peningkatan output, penciptaan lapangan kerja, serta memperluas kapasitas produksi domestik. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, peran FDI menjadi lebih signifikan karena membawa transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta efek limpahan (*spillover effect*) kepada perusahaan lokal. Berikut tabel *foreign direct investment* pada 5 negara ASEAN tahun 2019-2024.



Gambar 1.3 Foreign Direct Investment di Negara ASEAN-5 (Milyar USD)

Sumber: *World Development Index, 2026*

Berdasarkan Gambar 1.3, arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN-5 selama 2019-2024 menunjukkan pola fluktuatif, dengan Singapura secara konsisten menjadi penerima utama. Pandemi COVID-19 tahun 2020 memicu penurunan tajam FDI di seluruh kawasan FDI Singapura turun menjadi USD 79.753.262.990, sedangkan Indonesia mencapai USD 19.175.077.748. Adapun Thailand mengalami *net disinvestment* yang cukup besar pada tahun 2020 yaitu USD -4.293.910.667, hal ini disebabkan karena arus keluar modal asing jauh lebih besar dibanding arus masuk.

Investasi asing yang masuk ke Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang solid dengan peningkatan kembali ke angka USD 24.130.025.026 pada tahun 2024 setelah sempat turun tipis di tahun 2023 yakni USD 21.543.358.781. Fenomena ini didorong kuat oleh kebijakan hilirisasi komoditas (terutama nikel untuk baterai EV) dan pembangunan infrastruktur digital. Masalah mendasar yang masih membayangi adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur antarwilayah, di mana investasi masih terpusat di Jawa, serta

tantangan dalam kepastian hukum bagi investor jangka panjang (Budiman *et al.*, 2025).

Thailand mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan pemulihan ke angka USD 10.230.221.359 di 2024 setelah sempat merosot di tahun 2023 yakni sebesar USD 6.516.045.720. Fenomena ini mencerminkan pemulihan sektor otomotif dan elektronik, namun Thailand menghadapi masalah struktural yang berat diantaranya penuaan populasi yang cepat dan penurunan kualitas pendidikan yang melemahkan daya saing tenaga kerja dibandingkan Vietnam atau Indonesia (TDRI, 2026).

Adapun Filipina menunjukkan tren yang relatif stagnan di kisaran USD 9.492.234.668 pada tahun 2022 menurun pada tahun 2024 sebesar USD 8.929.837.510. Meskipun sektor energi terbarukan, logistik dan jasa keuangan mulai menarik minat, Filipina masih bergelut dengan masalah biaya listrik yang tinggi dan hambatan regulasi yang kompleks. Investor masih melihat Filipina sebagai pasar potensial namun penuh tantangan dalam hal kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) dibandingkan negara tetangganya (Devi & Devi, 2025).

Data menunjukkan lonjakan signifikan bagi Malaysia pada tahun 2024 sebesar USD 15.593.246.087 setelah penurunan tajam pada tahun 2023 sebesar USD 7.918.601.050. Berdasarkan pada laporan resmi dari Bank Negara Malaysia fenomena ini berkaitan erat dengan tren *China Plus One*, di mana perusahaan global mengalihkan rantai pasok ke Malaysia, khususnya di sektor semikonduktor dan pusat data. Masalah utamanya adalah stagnasi upah riil dan keterbatasan tenaga kerja ahli lokal yang dapat menghambat transisi menuju ekonomi berpendapatan tinggi.

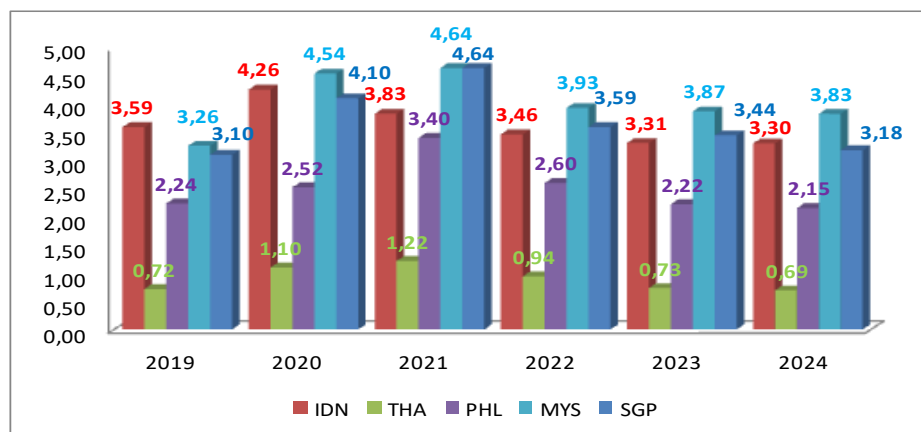
Sedangkan Singapura tetap menjadi penerima FDI terbesar dengan angka yang jauh melampaui negara tetangganya, mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar USD 151.941.202.884. Fenomena ini dipicu oleh posisi Singapura sebagai *safe haven* dan pusat manajemen kekayaan yang di mana sebagian besar alokasi FDI tersebar di sektor jasa keuangan, teknologi dan perdagangan internasional. Masalah utama yang dihadapi Singapura bukan pada kekurangan modal, melainkan pada risiko biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan lahan yang memaksa mereka terus berinovasi pada sektor bernilai tambah tinggi seperti teknologi finansial dan AI untuk mempertahankan daya saing (Bouguerra & Yalouli, 2025).

Berdasarkan data pada tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan disertai FDI yang juga fluktuatif, hal ini menjelaskan bahwa naik turunnya penerimaan modal asing memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara (Labidi *et al.*, 2024).

Adapun faktor lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi yaitu pengangguran. Pengangguran yang tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang, menurunkan konsumsi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Siti *et al.*, 2024). Tingkat pengangguran merupakan indikator untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang sedang tidak bekerja namun mempunyai keinginan dan usaha aktif untuk mendapatkan pekerjaan (Agustina *et al.*, 2022). Menurut Andabayeva *et al.* (2024), pengangguran bukan sekadar ketiadaan pekerjaan, melainkan juga ketidakmampuan memperoleh pekerjaan

yang layak, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut teori keynesian yang dikemukakan oleh Jhon Maynard Keynes menyatakan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya permintaan total dalam perekonomian, yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Lebih lanjut teori ini juga menjelaskan ketika permintaan agregat meningkat, perusahaan akan merespons dengan meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Sebaliknya, ketika permintaan agregat melemah, perusahaan akan mengurangi output karena penjualan menurun, yang kemudian menyebabkan penurunan kebutuhan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran. Berikut tingkat pengangguran di negara ASEAN-5 yaitu sebagai berikut.



Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran di Negara ASEAN-5 (Persen)

Sumber: *World Development Index, 2026*

Berdasarkan Gambar 1.4, tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN-5 periode 2019-2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika ekonomi regional dan pengaruh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perubahan struktur tenaga kerja. Pada tahun 2020, tingkat

pengangguran meningkat tajam di seluruh kawasan Indonesia 4,26%, Malaysia 4,54%, dan Singapura 4,10% akibat pembatasan mobilitas, penutupan industri, dan penurunan ekspor yang memicu gelombang PHK di sektor manufaktur dan jasa (Ardiyono, 2022).

Tingkat pengangguran di Indonesia secara konsisten mengalami penurunan dari tahun 2022 yakni 3,46% dan tahun 2023 sebesar 3,31% menjadi 3,30% pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini menunjukkan perbaikan, Indonesia masih menghadapi masalah ketidaksesuaian (*mismatch*) antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Adapun porsi pekerja informal yang besar dan tantangan pengangguran muda (usia 15-24 tahun) masih menjadi masalah yang umum. Penurunan tingkat pengangguran ini banyak didorong dari pemulihan sektor manufaktur dan perdagangan retail (Syukriansyah *et al.*, 2024).

Thailand pada tahun 2022 mencatatkan tingkat pengangguran paling rendah diantara negara lainnya yakni 0,94% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2024 sebesar 0,69%. Fenomena ini muncul disebabkan oleh definisi statistik yang mencakup pekerja sektor pertanian (meskipun kurang produktif) dan kurangnya jaring pengaman sosial yang memaksa orang untuk tetap bekerja apa pun jenisnya. Masalah utamanya ke depan adalah *aging population* (penuaan penduduk) yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil di sektor industri (Husna & Nasir, 2024).

Filipina menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang cukup signifikan dari 2,60% pada tahun 2022 ke 2,15% pada tahun 2024. Pemulihan ini didorong oleh sektor *Business Process Outsourcing* (BPO) dan pariwisata.

Masalah mendasar di Filipina adalah tingginya angka *underemployment* (pekerja yang ingin jam kerja lebih banyak) dan ketergantungan ekonomi pada remitansi pekerja migran, yang membuat pasar tenaga kerja domestik rentan terhadap guncangan eksternal (Donovan *et al.*, 2020).

Malaysia mengalami penurunan dari 3,93% pada tahun 2022 menjadi 3,83% pada tahun 2024. Meskipun angkanya tampak lebih tinggi dibanding negara ASEAN lain, pasar kerja Malaysia relatif lebih stabil secara formal. Masalah yang dihadapi adalah ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja asing di sektor perkebunan dan konstruksi, serta isu *brain drain* di mana tenaga kerja terampil Malaysia lebih memilih bekerja di Singapura karena perbedaan nilai tukar mata uang dan gaji (Harahap *et al.*, 2026).

Singapura mencatat penurunan dari 3,59% pada tahun 2022 menjadi 3,18% pada tahun 2024. Sebagai negara maju, pengangguran di Singapura bersifat friksional (perpindahan antar pekerjaan). Masalah utama negara ini adalah *gap* talenta digital dan kebutuhan untuk terus melakukan pengembangan bagi pekerja paruh baya agar tetap relevan di tengah otomatisasi dan adopsi teknologi yang sangat cepat di pusat keuangan global tersebut (Donovan *et al.*, 2020).

Berdasarkan data tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran di negara ASEAN-5 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data pada negara Singapura menunjukkan pasca pandemi yaitu pada tahun 2021 peningkatan tingkat pengangguran justru diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut. Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori dan hukum okun yang

menyatakan bahwa peningkatan pengangguran akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Bersamaan dengan itu, adapun faktor selain pengangguran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lainnya yakni korupsi. Dalam penelitian oleh Krifa *et al.* (2022) menemukan hasil antara hubungan FDI dengan korupsi pada studi perbandingan negara maju dan negara berkembang. Adapun fenomena pada negara maju, tingkat korupsi yang rendah mendorong FDI sedangkan di negara berkembang terdapat fenomena yang disebut “korupsi yang melumasi roda” di mana korupsi bisa menarik FDI dalam jangka pendek, tetapi tetap merupakan pilihan yang tidak bijaksana dalam jangka panjang karena hasil yang negatif. Dengan demikian, hal ini berdampak pada hambatan pertumbuhan ekonomi melalui korupsi yang rendah.

Korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh *Transparency International* menjadi indikator penting dalam menilai tingkat korupsi sektor publik. Skor IPK berkisar antara 0-100, di mana skor rendah mencerminkan korupsi tinggi, sedangkan skor tinggi menunjukkan tata kelola yang lebih bersih (Transparency International, 2012).

Studi oleh Suyatmiko, (2021) dalam *Integritas: Jurnal Antikorupsi* menelusuri penurunan skor IPK tahun 2020, yang dipengaruhi oleh faktor politik, dinamika demokrasi, dan respon publik terhadap pandemi. Meskipun ada berbagai kebijakan antikorupsi, persepsi publik masih dipengaruhi oleh kurangnya transparansi dan lemahnya integritas kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan skor IPK memerlukan reformasi institusional yang konsisten serta penerapan prinsip *good governance* secara berkelanjutan.

Berdasarkan laporan terbaru oleh *Transparency International*, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2025 turun menjadi 34 poin, menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 182 negara di dunia penurunan signifikan dari 37 pada tahun 2024 dan menunjukkan bahwa persepsi korupsi masih tinggi di sektor publik. Penurunan ini dikaitkan dengan melemahnya pengawasan publik dan meningkatnya praktik suap, nepotisme, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang mencerminkan tantangan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi.

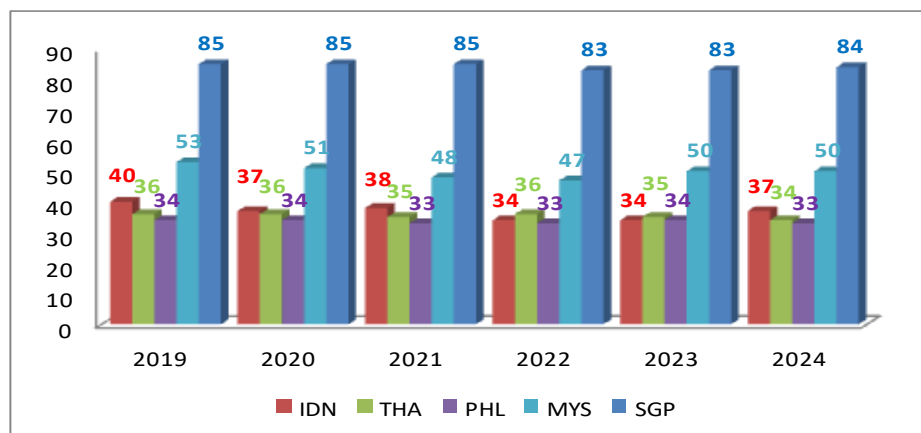
Berdasarkan data yang dirilis oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024-2025 terungkap pada pengadilan tindak pidana korupsi yang menangani ribuan perkara salah satunya kasus kerugian keuangan negara yang menjadi kasus terbanyak dengan total 2.530 perkara pada tahun 2024 yang menunjukkan praktik penyalahgunaan dana publik yang masih menjadi masalah utama dalam tata kelola pemerintahan.

Adapun kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia dalam sepanjang tahun diantaranya kasus penguasaan lahan secara ilegal seluas 37.095 hektare di kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau oleh PT Duta Palma Group pada tahun 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp78 triliun. Selanjutnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Menkominfo sebagai tersangka dalam korupsi pembangunan Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung untuk BAKTI Kominfo yang telah merugikan negara lebih dari Rp8 triliun (*sumber:indonesiabusinesspost*).

Ichvani & Sasana (2019) menjelaskan bahwa tingginya praktik korupsi di negara berkembang mencerminkan kegagalan perencanaan pemerintah yang

disebabkan oleh lemahnya kualitas institusi, sistem hukum, rendahnya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas publik membuat kepentingan pribadi pejabat dan elit politik lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat.

Teori ekonomi pertumbuhan baru oleh Acemoglu & Robinson (2012) menegaskan bahwa korupsi secara umum melemahkan kinerja ekonomi melalui misalokasi, inefisiensi, dan berkurangnya investasi. Berikut dibawah ini data indeks persepsi korupsi di negara ASEAN-5 sebagai berikut.



Gambar 1.5 Indeks Persepsi Korupsi di Negara ASEAN-5 (Poin)

Sumber: *countryeconomy.com* 2026

Berdasarkan Gambar 1.5, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di negara-negara ASEAN-5 menunjukkan pola fluktuatif dan cenderung stagnan sepanjang periode 2019-2024. Singapura mencatat skor tertinggi sebesar 85, menegaskan posisinya sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sistem birokrasi yang efisien. Sebaliknya, Indonesia dengan skor 40 masih berada pada kategori menengah, meskipun menunjukkan adanya perbaikan komitmen antikorupsi. Malaysia mengalami fluktuasi signifikan turun dari 53 poin pada tahun 2019 menjadi 47 poin pada tahun 2022.

Skor indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 34 meningkat pada tahun 2024 sebesar 37. Berdasarkan laporan berita

resmi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomika, Universitas Gadjah Mada tahun 2025 melihat fenomena ini bukan sebagai perbaikan yang fundamental, melainkan dampak dari adanya perubahan variabel indikator (penambahan data World Economic Forum). Penyebab terjadinya hal ini berawal pada pelemahan institusi penegak hukum secara sistematis dan meluasnya praktik konflik kepentingan di tingkat elit politik yang menurunkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum.

Thailand mengalami tren penurunan dari 36 di tahun 2022 menjadi 34 di tahun 2024. Fenomena ini berkaitan erat dengan proses transisi pemerintahan yang panjang dan kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan publik. Berdasarkan laporan resmi oleh Bangkok Post adapun masalah utama Thailand adalah pembajakan negara oleh sekelompok elit bisnis tertentu dengan tujuan mengambil keuntungan secara pribadi serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur besar, yang menyebabkan efektivitas pemberantasan korupsi terus merosot.

Filipina menunjukkan pergerakan yang stagnan di skor 33 pada tahun 2022 dan 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi anti-korupsi di tingkat pusat belum mampu menembus hambatan di tingkat lokal. Berdasarkan laporan resmi dari IBON Foundation permasalahan mendasar di Filipina adalah dinasti politik yang kuat dan budaya pelanggar hukum dalam birokrasi yang menghambat akses publik terhadap keadilan, diperparah dengan risiko keamanan bagi para jurnalis dan aktivis anti-korupsi.

Malaysia menunjukkan tren positif dengan kenaikan skor dari 47 pada tahun 2022 menjadi 50 pada tahun 2024. Fenomena ini didorong oleh komitmen

politik pasca-pemilu untuk memberantas korupsi tingkat tinggi dan membenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Namun, berdasarkan laporan resmi dari Transparency International Malaysia masalah yang masih mengakar adalah pengaruh politik dalam penunjukan jabatan di BUMN (GLC) serta kebutuhan akan transparansi dana kampanye yang lebih kuat agar kemajuan ini tidak bersifat temporer.

Singapura mempertahankan dominasinya dengan kenaikan skor menjadi 84 pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan keberhasilan sistem meritokrasi dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Berdasarkan laporan dari Transparency International masalah utama bagi Singapura bukan lagi pada korupsi birokrasi kecil, melainkan pada tantangan pencucian uang lintas batas dan aliran dana ilegal dari luar negeri yang mencoba masuk melalui pusat keuangan mereka, yang menuntut pengawasan sektor perbankan yang lebih ketat.

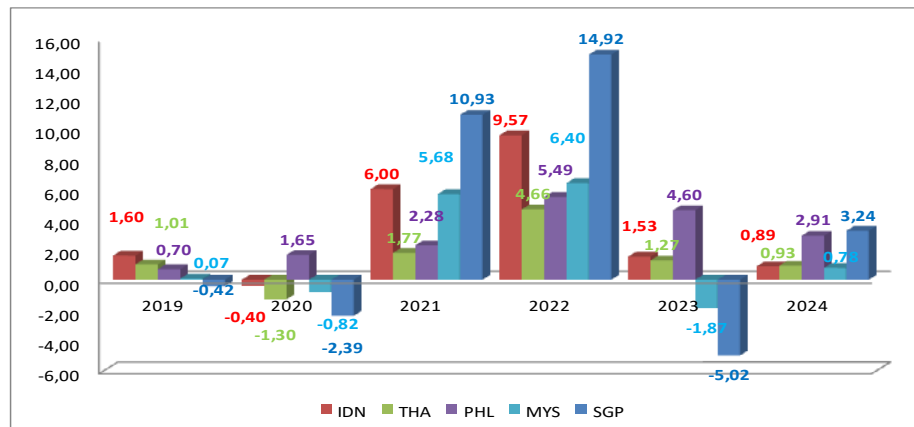
Berdasarkan data tahun 2019-2024, indeks persepsi yang tinggi (bersih dari korupsi) cenderung menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel cenderung memudahkan dalam biaya transaksi (*transaction costs*) bagi pelaku ekonomi, seperti biaya perizinan, pungutan tidak resmi, dan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis. Akibatnya, iklim investasi menjadi lebih kondusif karena investor merasa lebih aman dan percaya bahwa aturan hukum ditegakkan secara adil. Fakta lain terungkap pada Filipina yang menunjukkan data indeks persepsi yang rendah pada tahun 2021-2024 justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Temuan baru ini mendasari pada kajian penelitian lebih lanjut

untuk melihat bagaimana korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Selain korupsi, inflasi yang tinggi kerap menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian, menurunkan daya beli masyarakat, dan menghambat investasi di sektor produktif (Sekwati & Dagume, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi berlebihan menimbulkan distorsi harga relatif, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, serta menghambat keputusan investasi jangka panjang. Dengan demikian, inflasi yang tidak terkendali dapat mengikis kepercayaan investor dan mengguncang stabilitas keuangan nasional.

Sebaliknya, inflasi yang moderat dan stabil justru dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori Keynesian, inflasi ringan dapat merangsang peningkatan produksi karena mendorong permintaan agregat. Studi oleh Niken *et al.* (2023) menemukan inflasi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan kestabilan makroekonomi yang mampu menarik minat investasi.

Inflasi diartikan sebagai kenaikan umum dan berkelanjutan harga barang serta jasa, yang mencerminkan penurunan daya beli uang. Pergerakannya biasanya diukur melalui *Consumer Price Index (CPI)*, *Personal Consumption Expenditure (PCE)*, atau GDP deflator. Teori ekonomi modern menjelaskan bahwa inflasi dapat dipicu oleh tekanan permintaan (*demand-pull*), kenaikan biaya produksi (*cost-push*), maupun ekspektasi harga di masa depan. Berikut dibawah ini inflasi di negara ASEAN-5 sebagai berikut.



Gambar 1.6 Inflasi di Negara ASEAN-5 (Persen)

Sumber: *World Development Index*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.6, laju inflasi di lima negara ASEAN tahun 2019-2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2019, inflasi relatif terkendali dengan Indonesia 1,60%, Thailand 1,01%, Filipina 0,70%, Malaysia 0,07%, dan Singapura mengalami deflasi ringan sebesar -0,42% diakibatkan oleh lemahnya permintaan domestik. Tahun 2020, tekanan inflasi melemah tajam seiring kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, bahkan beberapa negara mengalami deflasi seperti Indonesia -0,40%, Thailand -1,30%, dan Singapura -2,39%, mencerminkan turunnya konsumsi dan terganggunya produksi (Economic Outlook, 2025).

Indonesia dengan inflasi pada tahun 2022 sebesar 9,57% dan mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 sebesar 1,53% dan tahun 2024 sebesar 0,89%. Adapun fenomena ini menunjukkan keberhasilan kebijakan stabilisasi pasca guncangan global (kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok 2022). Namun, masalah yang muncul adalah indikasi pelemahan daya beli masyarakat dan perlambatan permintaan domestik, karena inflasi yang terlalu rendah bisa mencerminkan konsumsi yang tidak kuat. Secara struktural, inflasi di Indonesia

sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dan jumlah uang beredar, sehingga stabilitas makro yang ketat menekan inflasi secara signifikan (Suprayogi & Chaidir, 2026).

Thailand menunjukkan pola yang hampir serupa, dari 4,66% pada tahun 2022 turun drastis ke 1,27% pada tahun 2023 dan 0,93% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan pada pemulihan ekonomi yang lambat terutama di sektor pariwisata dan konsumsi domestik, sehingga tekanan inflasi menurun. Masalah utama Thailand adalah ketergantungan pada permintaan eksternal dan sektor pariwisata, sehingga ketika permintaan global melemah, inflasi ikut turun. Adapun keterbukaan ekonomi dan ketergantungan perdagangan membuat inflasi sangat sensitif terhadap fluktuasi global dan nilai tukar (Fauziah & Kurnia, 2024).

Filipina menunjukkan inflasi yang relatif lebih tinggi dibanding negara lain, meskipun menurun pada tahun 2022 5,49% menjadi 4,60% pada tahun 2023 dan 2,91% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya tekanan inflasi yang konsisten, terutama dari sisi permintaan domestik dan kenaikan biaya produksi. Masalah struktural Filipina adalah ketergantungan pada impor pangan dan energi, sehingga inflasi lebih sulit ditekan. Secara empiris, inflasi di negara berkembang seperti Filipina sering dipicu oleh kombinasi *demand-pull* dan *cost-push inflation* (Selvina & Nurhayati, 2024).

Malaysia mengalami perubahan ekstrem dari inflasi yang positif 6,40% pada tahun 2022 menjadi deflasi pada tahun 2023 -1,87% lalu kembali positif pada tahun 2024 sebesar 0,78%. Hal ini menunjukkan adanya guncangan penurunan harga atau lemahnya permintaan domestik pada tahun 2023. Deflasi menjadi masalah serius karena dapat menandakan stagnasi ekonomi dan penurunan aktivitas konsumsi. Secara struktural, inflasi di Malaysia sangat

dipengaruhi oleh suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan moneter, sehingga perubahan kebijakan dapat dengan cepat mengubah arah inflasi (Sari *et al.*, 2023).

Singapura menunjukkan pola paling ekstrem, dari inflasi sangat tinggi pada tahun 2022 yakni 14,92% menjadi deflasi -5,02% pada tahun 2023 dan kembali naik sebesar 3,24% pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan volatilitas tinggi akibat karakter ekonomi yang sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan global. Inflasi yang tinggi pada tahun 2022 dipicu oleh *imported inflation* (harga impor), sementara deflasi pada tahun 2023 menunjukkan penurunan tajam pada permintaan global dan koreksi harga. Permasalahan utama Singapura adalah sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi global, karena sebagai hubungan perdagangan antar negara luar, inflasi sangat dipengaruhi oleh arus ekspor-impor dan nilai tukar (Hidayanto & Riyardi, 2024).

Kondisi inflasi yang tinggi mendorong pengetatan suku bunga yang membatasi akses kredit produktif dan menghambat investasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Saidi & Ochi (2023) bahwa inflasi berhubungan negatif dengan arus dan kualitas FDI di negara berkembang. Selain itu, inflasi juga menurunkan konsumsi rumah tangga dan memicu pengurangan tenaga kerja, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk pengangguran (Mohamed & Abdi, 2024).

Studi yang dilakukan oleh (Wehncke *et al.*, 2023; Emako *et al.*, 2022; Labidi *et al.*, 2024 ; Saidi & Ochi, 2023) menegaskan bahwa FDI berperan penting dan memiliki dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan *panel cointegration*, panel VAR dan panel ARDL.

Studi oleh Ichsan *et al.* (2023) menemukan bahwa FDI dalam jangka pendek berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan dalam jangka panjang efek FDI terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai negatif signifikan di Indonesia. Hussain *et al.* (2021) dalam studinya yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah dan kelompok negara berpendapatan tinggi menemukan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan studi Chizema *et al.* (2025) juga menemukan FDI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan korupsi berpengaruh positif tidak signifikan dalam jangka panjang di Afrika Selatan.

Penelitian oleh Ngubane *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di Afrika Selatan. Husna & Nasir (2024) juga menyatakan hasil yang sama bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN. Studi oleh Goto & Bürgi (2021) dengan mengadopsi hukum okun dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pengangguran memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Inggris, Swiss, dan Jepang. Di Indonesia dalam studi oleh Alrahman *et al.* (2022) menemukan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Sementara dalam penelitian Putri *et al.* (2023) dalam studinya yang diteliti di Indonesia menemukan adanya pengaruh positif signifikan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sokunbi *et al.* (2025) di negara-negara Afrika Barat menyatakan bahwa tingkat

pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Silalahi & Nasution (2025) juga menemukan hasil yang sama pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di 6 negara ASEAN.

Selain itu, studi oleh (Malanski & Póvoa, 2021; Tutuncu & Bayraktar, 2024) dengan menggunakan pendekatan *panel cointegration*, menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Penelitian Spyromitros & Panagiotidis (2022) menunjukkan pada negara-negara berkembang di Amerika Latin menemukan korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang negatif. Malanski & Póvoa (2021) membandingkan negara berkembang di Amerika Latin dan Asia Pasifik hasil penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di kawasan Asia oleh Susilowati *et al.* (2024) menemukan bahwa variabel korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Barat, Asia Timur dan Asia Tenggara.

Sementara itu, penelitian (Ngubane *et al.* 2023; Mohamed & Abdi, 2024) dengan menggunakan metode *panel estimation* dan VECM, menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Studi oleh Uddin & Rahman (2023) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi dan pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 79 negara berkembang di dunia. Sekwati & Dagume (2023) menyatakan bahwa variabel inflasi dan pengangguran memiliki dampak negatif signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Afrika Selatan. Studi oleh Niken *et al.*

(2023) menemukan adanya inflasi memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan di Ethiopia.

Berdasarkan tinjauan literatur pada hasil yang inkonsistensi diatas, sebagian besar penelitian cenderung fokus pada periode yang pendek atau menggunakan sampel global yang heterogen. Meskipun demikian, celah penelitian lain muncul yang sebagian besar penelitian lain belum memasukkan variabel korupsi sebagai indikator yang dapat mengukur kualitas kelembagaan suatu negara, serta hal ini menunjukkan perlunya analisis empiris lanjutan, yang mencakup rentang waktu yang lebih panjang dan studi perbandingan antarnegara (Lee *et al.*, 2024).

Selain itu, ditemukannya celah penelitian lain dari studi Febrianto *et al.* (2025) di mana keterbatasan pada penelitian tersebut belum menjelaskan peran institusional lembaga pemerintahan antarnegara di kawasan ASEAN, metode yang digunakan sebelumnya yakni *Threshold Panel Autoregressive* (TPAR) belum mampu mengidentifikasi hubungan nonlinier dan titik *threshold*, namun kurang sensitif terhadap dinamika jangka panjang antarvariabel, serta cakupan observasi analisis data yang pendek belum menangkap efek kebijakan ekonomi yang lambat.

Studi ini menawarkan kebaruan yang penting untuk diteliti lebih lanjut di mana studi ini merupakan studi pertama yang menganalisis ASEAN-5 menggunakan dataset 30 tahun (1995-2024) dengan penggunaan model panel ARDL sebagai alat analisisnya, mengintegrasikan keempat variabel independen yaitu (FDI, pengangguran, korupsi, dan inflasi) ke dalam model dinamis terpadu

yang belum pernah diteliti sebelumnya, menyelesaikan kontradiksi teoritis dan empiris yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, serta menggabungkan guncangan struktural pascapandemi, sehingga temuan ini sangat relevan bagi kebijakan pertumbuhan yang kontemporer di negara-negara berkembang kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan acuan masalah di atas dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam pada judul “**Analisis Pengaruh *Foreign Direct Investment*, Tingkat Pengangguran, Korupsi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-5**” dengan menggunakan alat analisis *cross-section* Panel ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) dengan jumlah observasi 30 tahun (1995-2024). Pemilihan model panel ARDL ini didasarkan pada keefektifan dalam mengakomodasi heterogenitas struktural antarnegara, sehingga lebih sesuai digunakan untuk kawasan ASEAN-5 yang memiliki perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi, kebijakan makro, serta kualitas institusinya dibandingkan model panel konvensional lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil kesimpulan pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *foreign direct investment* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dalam dibuatnya penelitian ini dimaksudkan pada poin-poin berikut.

1. Mengetahui pengaruh *foreign direct investment* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang di harapkan pada hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang aspek pertumbuhan yang berkelanjutan dan tetap memegang peranan-peranan penting dalam menghadapi tantangan struktural, institusional, fiskal dan moneter dalam pemerintahan suatu negara.
2. Sebagai acuan dan landasan bagi peneliti lainnya agar dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut dan dapat menggunakan sebuah pendekatan yang komprehensif serta dapat menjelaskan hasil yang efektif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di harapkan pada hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura), hasil dari penelitian ini dapat memberikan landasan empiris dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro yang berbasis bukti (*evidence based policy*) melalui korupsi.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis dalam pengambilan keputusan investasi di kawasan negara ASEAN-5 dengan mempertimbangkan *trade-off* antara resiko dan *return*.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini menjadi bahan pemikiran dan fenomena perubahan isu-isu lebih lanjut, serta sebagai bahan acuan untuk kepentingan perspektif dan kajian pembandingan.